

## BAB VII PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Ukuran dan tujuan kebijakan implementasi *ASEAN Medical Device Directive* belum tercapai untuk meningkatkan kualitas dan ekspor alat kesehatan dalam negeri.
2. Ketersediaan SDM dan sumberdaya finansial sudah optimal. Ketersediaan sumberdaya fasilitas belum mencukupi, meliputi : ketersediaan standar acuan dan lembaga penilaian kesesuaian.
3. Karakteristik badan pelaksana sudah berjalan baik. Sudah ada pembagian tanggung jawab dan SOP.
4. Komunikasi antar organisasi sudah terlaksana tapi belum menasar semua industri. Kebijakan ditransmisikan melalui koordinasi lintas sektor, sosialisasi dan buku pedoman. Kebijakan sudah disampaikan secara jelas dan konsisten.
5. Sikap badan pelaksana sudah berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan AMDD dan pemberian insentif mempengaruhi sikap pelaksana kebijakan.
6. Lingkungan ekonomi dan politik tidak berpengaruh terhadap implementasi kebijakan AMDD.



### B. Saran

1. **Kementerian Kesehatan**  
Membuat formula untuk mengetahui berapa kapasitas lembaga penilaian kesesuaian di Indonesia, sehingga dapat diketahui jumlah kebutuhan lembaga penilaian kesesuaian dan ruang lingkup pengujian
2. **Badan Standardisasi Nasional**  
Meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* untuk mempercepat proses perumusan SNI alat kesehatan
3. **Kementerian Perdagangan**  
Memperluas perjanjian dagang di ASEAN dari *business to business* menjadi *government to government*

#### 4. Peneliti Selanjutnya

- a. Melakukan penelitian terkait pengaruh implementasi kebijakan *ASEAN Medical Device Directive* terhadap peningkatan ekspor alat kesehatan dalam negeri, dilihat dari sudut pandang industri yang sudah melakukan ekspor dan yang belum pernah melakukan ekspor.
- b. Melakukan penelitian *ASEAN Medical Device Directive* dengan membandingkan implementasi kebijakan ini pada masing masing negara ASEAN.

